



LAPORAN KEUANGAN 2017

OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA



AUDITED

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Singkatan	vii
Pernyataan Telah di Reviu	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis Ombudsman RI	8
A.3. Pendapatan Ombudsman RI	9
A.4. Belanja Ombudsman RI	10
A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
A.7. Basis Akuntansi	25
A.8. Dasar Pengukuran	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja Negara	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1. Aset Lancar	32
C.2. Aset Tetap	35
C.3. Aset Lainnya	39
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	41
C.5. Ekuitas	42

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	43
D.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	43
D.1.2. Beban Operasional	43
D.1.2.1 Beban Pegawai	44
D.1.2.2 Beban Persediaan	44
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa	45
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan	45
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	46
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
D.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
E.1. Ekuitas Awal	49
E.2. Surplus (Defisit) LO	49
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas	49
E.4. Transaksi Antar Entitas	50
E.5. Ekuitas Akhir	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Ringkasan LRA 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	1
TABEL 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	2
TABEL 3 Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	10
TABEL 4 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	10
TABEL 5 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22
TABEL 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	23
TABEL 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017	26
TABEL 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	26
TABEL 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2017	27
TABEL 10 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	28
TABEL 11 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	28
TABEL 12 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	30
TABEL 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	31
TABEL 14 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	32
TABEL 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	32
TABEL 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2017	33
TABEL 17 Rincian Belanja Dibayar Di Muka (<i>prepaid</i>) 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	34
TABEL 18 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017	34
TABEL 19 Rincian Persediaan	35
TABEL 20 Rincian Aset Tetap 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	35

TABEL 21	Nilai Tanah 31 Desember Tahun 2017	36
TABEL 22	Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017	36
TABEL 23	Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017	37
TABEL 24	Mutasi Aset Tetap Lainnya	38
TABEL 25	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
TABEL 26	Rincian Aset Lainnya	39
TABEL 27	Rincian Aset tak Berwujud	39
TABEL 28	Aset Lain-lain	40
TABEL 29	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	40
TABEL 30	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	41
TABEL 31	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	41
TABEL 32	Rincian Beban Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	43
TABEL 33	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	44
TABEL 34	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 2016	44
TABEL 35	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	45
TABEL 36	Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	46
TABEL 37	Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	46
TABEL 38	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	47
TABEL 39	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2017	48
TABEL 40	Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	49
TABEL 41	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2017	49
TABEL 42	Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2017 dan 2016	50

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK 1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016	11
GRAFIK 2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2017	27

KATA PENGANTAR

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu entitas Pengguna Anggaran/Barang sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal



✓ Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001



DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RI	: Republik Indonesia
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2017 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Ombudsman Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya kelemahan pengelolaan persediaan, baik dari sistem dan pencatatannya. Terhadap pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen.

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait lainnya.

Jakarta, 15 Februari 2018
Kabag Pengawasan Internal



Timotius Tarigan
Timotius Tarigan
NIP 19650526 198603 1 001



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2017 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp666.735.315,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp138.716.298.862,00 atau 89,42% dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp155.128.664.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

TABEL 1

Ringkasan LRA 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2017		Tahun Anggaran 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	666.735.315	0	2.525.805.027
Belanja Rupiah Murni	155.128.664.000	138.716.298.862	170.056.252.000	126.143.918.276

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah Rp28.182.144.248,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp4.118.251.762,00 dan Aset Tetap sebesar Rp23.596.384.504,00 serta Aset lainnya sebesar Rp467.507.982,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah Rp329.574.269,00. Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah Rp27.852.569.979,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

TABEL 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12-2017	31-12-2016	
Aset			
Aset Lancar	4.118.251.762	4.155.609.961	(37.358.199)
Aset Tetap	23.596.384.504	23.093.509.152	502.875.352
Aset Lainnya	467.507.982	447.354.423	20.153.559
Jumlah Aset	28.182.144.248	27.696.473.536	485.670.712
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	329.574.269	2.004.273.670	(1.674.699.401)
Ekuitas			
Ekuitas	27.852.569.979	25.692.199.866	2.160.370.113
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	28.182.144.248	27.696.473.536	485.670.712

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.574.250,00 sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp137.110.680.164,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(Rp137.087.105.914,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.203.565.605,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(135.883.540.309,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Ekuitas pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai berikut:

• Ekuitas Awal 01/01/2017	Rp 25.692.199.866,00
• Defisit Laporan Operasional	(Rp 135.883.540.309,00)
• Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(Rp 5.653.125,00)
• Transaksi Antar Entitas	Rp 138.049.563.547,00
• Ekuitas Akhir 31/12/2017	Rp 27.852.569.979,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sedangkan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017		%TASE	31 DES 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	666.735.315	0,00	2.525.805.027
Jumlah Pendapatan		-	666.735.315	0,00	2.525.805.027
BELANJA	B.2				
➤ Belanja Pegawai		52.655.448.000	48.183.387.998	91,51	36.406.259.320
➤ Belanja Barang		96.376.945.000	84.645.740.449	87,83	76.659.686.922
➤ Belanja Modal		6.096.271.000	5.887.170.415	96,57	13.077.972.034
Jumlah Belanja		155.128.664.000	138.716.298.862	89,42	126.143.918.276
➤ Belanja Pegawai	B.2.1	52.655.448.000	48.183.387.998	91,51	36.406.259.320
➤ Belanja Barang	B.2.2	96.376.945.000	84.645.740.449	87,83	76.659.686.922
➤ Belanja Modal	B.2.3	6.096.271.000	5.887.170.415	96,57	13.077.972.034

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. NERACA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	8.874.678
➤ Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	621.065.134
➤ Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.3	3.120.991.906	2.883.605.758
➤ Piutang Bukan Pajak	C.1.4	119.447.063	97.647.995
➤ Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(597.235)	(488.240)
➤ <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		<i>118.849.828</i>	<i>97.159.755</i>
➤ Persediaan	C.1.5	878.410.028	544.904.636
JUMLAH ASET LANCAR		4.118.251.762	4.155.609.961
ASET TETAP	C.2		
➤ Tanah	C.2.1	7.315.400.000	7.315.400.000
➤ Peralatan dan Mesin	C.2.2	40.151.199.049	35.608.495.801
➤ Gedung dan Bangunan	C.2.3	0	0
➤ Aset Tetap Lainnya	C.2.4	3.069.208.880	2.052.544.413
➤ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(26.939.423.425)	(21.882.931.062)
JUMLAH ASET TETAP		23.596.384.504	23.093.509.152
ASET LAINNYA	C.3		
➤ Aset Tak Berwujud	C.3.1	669.729.234	467.059.234
➤ Aset Lain-lain	C.3.2	1.256.377.439	1.256.377.439
➤ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.458.598.691)	(1.276.082.250)
JUMLAH ASET LAINNYA		467.507.982	447.354.423
JUMLAH ASET		28.182.144.248	27.696.473.536
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
➤ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	329.574.269	1.374.333.858
➤ Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0	8.874.678
➤ Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2	0	621.065.134
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		329.574.269	2.004.273.670
JUMLAH KEWAJIBAN		329.574.269	2.004.273.670
EKUITAS			
➤ Ekuitas	C.5	27.852.569.979	25.692.199.866
JUMLAH EKUITAS		27.852.569.979	25.692.199.866
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28.182.144.248	27.696.473.536

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN OPERASIONAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL			
➤ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	23.574.250	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1	23.574.250	0
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
➤ Beban Pegawai	D.1..2.1	48.161.588.930	36.308.611.325
➤ Beban Persediaan	D.1..2.2	1.922.700.830	1.315.993.171
➤ Beban Barang dan Jasa	D.1..2.3	36.627.603.908	33.335.005.749
➤ Beban Pemeliharaan	D.1..2.4	5.158.534.240	4.289.176.371
➤ Beban Perjalanan Dinas	D.1..2.5	40.026.787.582	33.375.939.340
➤ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1..2.6	5.213.355.679	5.151.092.882
➤ Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.1..2.7	108.995	488.240
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	D.1.2	137.110.680.164	113.776.307.078
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)	D.1	(137.087.105.914)	(113.776.307.078)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1	0	(11.390.068)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	1.203.565.605	2.270.581.151
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	D.2	1.203.565.605	2.259.191.083
SURPLUS/DEFISIT LO (D.1+D.2)		(135.883.540.309)	(111.517.115.995)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
EKUITAS AWAL	E.1	25.692.199.866	13.648.349.096
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(135.883.540.309)	(111.517.115.995)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI NILAI EKUITAS	E.3		
➤ Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
➤ Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	(5.653.125)	(57.164.484)
Jumlah Koreksi	E.3	(5.653.125)	(57.146.484)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
➤ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	138.716.298.862	126.143.918.276
➤ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(666.735.315)	(2.525.805.027)
➤ Transfer Keluar	E.4.3	-	-
Jumlah Transaksi Antar Entitas	E.4	138.049.563.547	123.618.113.249
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(E2+E3+E4)	2.160.370.113	12.043.850.770
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	27.852.569.979	25.692.199.866

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 – 2021, visi Ombudsman Republik Indonesia adalah “Ombudsman Republik Indonesia yang

Berwibawa, Efektif dan Adil”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memperkuat Kelembagaan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan.
5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelembagaan Ombudsman RI yang kuat.
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Hak-Hak Dasar melalui Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Penyelenggara Layanan Publik
5. Menguatnya Peran Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Maladministrasi dan Korupsi.

Pendapatan

A.3. PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 Ombudsman Republik Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisasi PNBP Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp666.735.315,00 yang terdiri atas Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu.

Dibandingkan dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi

terdiri atas PNBPN berupa Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL sebesar Rp2.525.805.027,00.

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 disajikan sebagai berikut :

TABEL 3
PERBANDINGAN PENDAPATAN
31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBPN		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2017	2016	
1.	Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu	666.735.315	2.525.805.027	(1.859.069.712)
2.	Pendapatan lain-lain	0	0	0
	JUMLAH	666.735.315	2.525.805.027	(1.859.069.712)

Belanja

A.4. BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp138.716.298.862,00 atau 89,42% dari anggaran sebesar Rp155.128.664.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

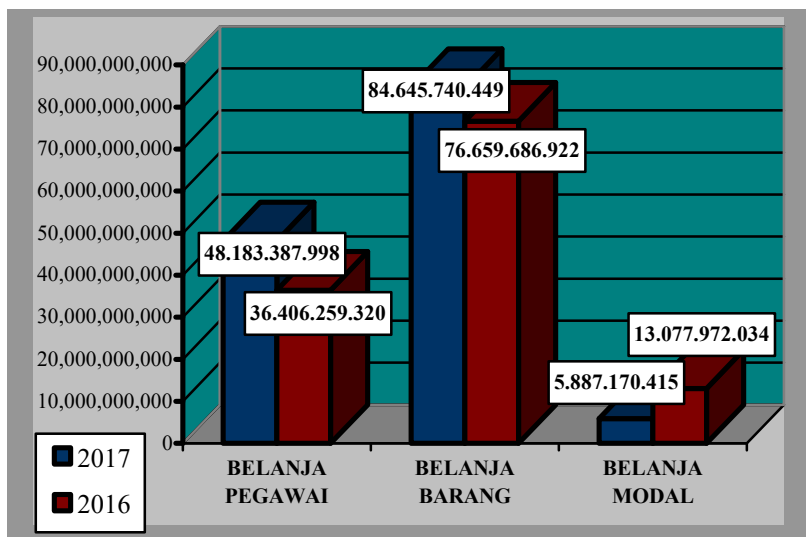
Rincian realisasi belanja Anggaran 31 Desember Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 disajikan sebagai berikut :

TABEL 4
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA
31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2017	2016	
51	Belanja Pegawai	48.183.387.998	36.406.259.320	11.777.128.678
52	Belanja Barang	84.645.740.449	76.659.686.922	9.986.053.527
53	Belanja Modal	5.887.170.415	13.077.972.034	(7.190.801.619)
	JUMLAH	138.716.298.862	126.143.918.276	12.572.380.586

Komposisi Realisasi Belanja Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember 2017 dan 2016 di sajikan pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA
31 DESEMBER 2017 dan 2016



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 31 Desember 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan

dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBN terdiri atas Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia dan disusun berdasarkan SAI.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember Tahun 2016 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Ombudsman Republik Indonesia berasal dari Kegiatan Non-operasional yaitu dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat

keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara

tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal

Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode equitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/ daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang	10
Hak Ekonomis Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih*

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

TABEL 5

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap*

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6

TABEL 6

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Informasi
Pendapatan dan
Belanja Akrua*

(10) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat, satuan kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrua berdasarkan data akrua pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan belanja secara akrua merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrua diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrua, sedangkan belanja secara akrua diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrua.

Transaksi pendapatan secara akrua terdiri atas :

- a. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.
- b. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi belanja secara akrua terdiri atas :

- a. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrua dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.
- b. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrua dan sebagai piutang pada neraca.

Basis Akuntansi

A.7. BASIS AKUNTANSI

Ombudsman RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realiasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.8. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ombudsman RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp 666.735.315*

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Rp666.735.315,00 yang merupakan sisa anggaran tahun yang lalu.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini:

TABEL 7.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2017

URAIAN	2017		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	666.735.315	-
Jumlah	-	666.735.315	-

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 73,60 persen dari realisasi pendapatan PNB 31 Desember Tahun Anggaran 2016.

TABEL 8.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31-12-2017	REALISASI 31-12-2016	% Naik (Turun)
1. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	666.735.315	2.525.805.027	(73,60)
Jumlah Pendapatan	666.735.315	2.525.805.027	(73,60)

Pendapatan pada Ombudsman RI merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2017. Daftar rincian PNB Tahun 2017 (lihat lampiran pendukung).

Realisasi Belanja
Negara
Rp 138.716.298.862

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2017 adalah Rp138.716.298.862,00 atau 89,42% dari anggaran senilai Rp155.128.664.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel Berikut:

TABEL 9.

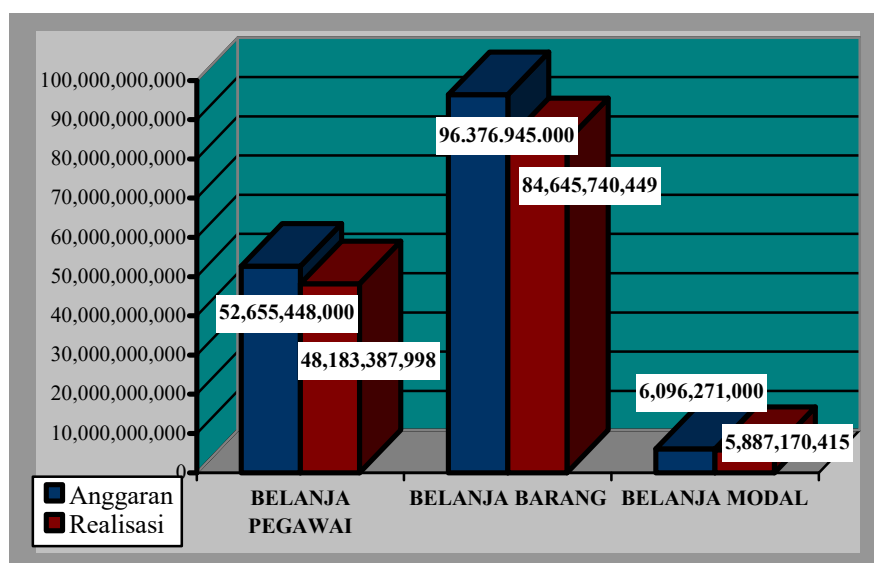
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	52.655.448.000	48.183.387.998	91,51
Belanja Barang	96.376.945.000	84.645.740.449	87,83
Belanja Modal	6.096.271.000	5.887.170.415	96,57
Total Belanja	155.128.664.000	138.716.298.862	89,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 2.

Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2017



Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,96 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2016.

Kenaikan Realisasi Belanja disebabkan oleh:

1. Penambahan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung rencana kerja strategis.
2. Penambahan kegiatan substansi sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

TABEL 10.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	% Naik(Turun)
Belanja Pegawai	48.183.387.998	36.406.259.320	32,34
Belanja Barang	84.645.740.449	76.659.686.922	10,41
Belanja Modal	5.887.170.415	13.077.972.034	(54,98)
Jumlah Belanja	138.716.298.862	126.143.918.276	9,96

Belanja Pegawai
Rp48.183.387.998

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2017 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Honorarium; dan Belanja Tunjangan Khusus.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 masing-masing sebesar Rp48.183.387.998,00 dan Rp36.406.259.320,00 dan terdapat pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran sebesar Rp10.225.485,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 11.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	% (Naik/ Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.100.379.537	6.568.340.752	8,10
Belanja Honorarium	14.764.325.500	11.162.945.040	32,26
Belanja Tunjangan Khusus	26.328.908.446	18.678.473.982	40,28
Jumlah Belanja Kotor	48.193.613.483	36.409.759.774	32,64
Pengembalian Belanja Pegawai	(10.225.485)	(3.500.454)	192,11
Jumlah Belanja Bersih	48.183.387.998	36.406.259.320	32,34

Berdasarkan Tabel tersebut realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,34% dari realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2016.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan Calon Asisten (CA) sebanyak 196 orang pegawai di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Kenaikan besaran Insentif bagi Asisten Ombudsman RI.
3. Kenaikan Penghasilan Ketua dan Anggota Ombudsman RI.
4. Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Ombudsman RI menjadi 70%.

Belanja Barang
Rp84.645.740.449

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 masing-masing sebesar Rp84.645.740.449,00 dan Rp 76.659.686.922,00.

Berdasarkan Tabel 12 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2017 mengalami kenaikan 10,41% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia.

TABEL 12.
 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2017	REALISASI 31 Desember 2016	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	8.771.194.408	6.510.270.451	34,72
Belanja barang persediaan	1.697.587.182	2.900.329.751	(41,46)
Belanja Barang Non Operasional	11.959.116.215	10.780.248.339	10,93
Belanja Jasa	17.154.226.324	18.422.554.038	(6,88)
Belanja Pemeliharaan	5.060.368.608	4.790.809.103	5,62
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	42.591.628.233	35.415.834.416	20,26
Belanja Perjalanan Luar Negeri	218.467.834	733.169.206	(70,20)
Jumlah Belanja Kotor	87.452.588.804	79.553.215.304	9,92
Pengembalian Belanja	(2.806.848.355)	(2.893.528.382)	(2,99)
Jumlah Belanja Bersih	84.645.740.449	76.659.686.922	10,41

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp2.806.848.355,00 selama tahun 2017. (lihat lampiran pendukung)

Belanja Modal
Rp5.887.170.415

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.887.170.415,00 dan Rp13.077.972.034,00.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebesar (54,98)% bersamaan dengan penurunan Anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2017.

TABEL 13.
 Perbandingan Realisasi Belanja Modal
 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BELANJA	REALISASI 31-12-2017	REALISASI 31-12-2016	%(NAIK /TURUN)
Kendaraan Bermotor	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.350.337.428	12.820.847.034	(66,06)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	996.664.467	-	-
Belanja Modal Lainnya	540.168.520	257.225.000	109,99
Jumlah Belanja Kotor	5.887.170.415	13.078.072.034	(54,98)
Pengembalian Belanja Modal	0	(100.000)	-
Jumlah Belanja Bersih	5.887.170.415	13.077.972.034	(54,98)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp4.118.251.762

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp4.118.251.762,00 dan Rp4.155.609.961,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut

TABEL 14.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

NO	ASET LANCAR	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.874.678
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	621.065.134
3	Belanja Dibayar di Muka	3.120.991.906	2.883.605.758
4	Piutang Bukan Pajak	119.447.063	97.647.995
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(597.235)	(488.240)
6	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>118.849.828</i>	<i>97.159.755</i>
7	Persediaan	878.410.028	544.904.636
	Jumlah	4.118.251.762	4.155.609.961

Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.874.678,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 15.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	JENIS	31 Desember 2017
1	Sisa UP	0
2	Sisa TUP	0
	Jumlah	0

Pada Tahun Anggaran 2017 sisa UP dan TUP telah di setorkan ke Kas Umum Negara (KUN) sebelum tanggal 31 Desember 2017.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa selain UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Pada Tahun Anggaran sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia memiliki Kas Lainnya dan Setara Kas bersumber dari Pungutan Pajak dan sisa uang LS Perjalanan Dinas yang belum disetor per tanggal neraca.

Realisasi Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.621.065.134,00. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

TABEL 16.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2017 dan 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Pungutan Pajak Yang Belum Disetor	0	4.193.158
2	Sisa LS Perjalanan Dinas yang Belum Disetor	0	616.613.176
3	Uang lain-lain	0	258.800
Jumlah		0	621.065.134

Pada Tahun Anggaran 2017 Sisa Kas Lainnya dan Setara Kas telah disetorkan ke Kas Umum Negara (KUN) sebelum tanggal 31 Desember 2017.

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp3.120.991.906

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Rp3.120.991.906,00 dan Rp2.883.605.758,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 17.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) 31 Desember 2017 dan 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Pembayaran Sewa Kendaraan	1.358.496.046	1.617.424.244
2	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.762.495.860	1.266.181.514
Jumlah		3.120.991.906	2.883.605.758

Piutang Bukan
Pajak
Rp119.447.063

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp119.447.063,00 yang merupakan kelebihan pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman RI, masing-masing sebesar Rp82.420.000,00 dan Rp37.027.063,00. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 18.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	82.420.000	76.583.400
2	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	37.027.063	21.064.595
Piutang Bukan Pajak		119.447.063	97.647.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(597.235)	(488.240)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		118.849.828	97.159.755

Persediaan
Rp878.410.028

C.1.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Rp878.410.028,00 dan Rp544.904.636,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 19.
Rincian Persediaan

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal 01/01/2017	544.904.636
Mutasi Tambah:	
Belanja TA 2017	1.695.861.682
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	812.088.093
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan TA 2017	1.922.700.830
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	60.000
Beban Penyesuaian Nilai Aset	251.683.553
Saldo Akhir 31/12/2017	878.410.028

Aset Tetap
Rp23.596.384.504

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing tersaji sebesar Rp23.596.384.504,00 dan Rp23.093.509.152,00. Aset Tetap yang disajikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 20.
Rincian Aset Tetap 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

NO	JENIS	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Tanah	7.315.400.000	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	40.151.199.049	35.608.495.801
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	3.069.208.880	2.052.544.413
Jumlah		50.535.807.929	44.976.440.214
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(26.939.423.425)	(21.882.931.062)
Nilai Buku Aset Tetap		23.596.384.504	23.093.509.152

Tanah
Rp7.315.400.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta seluas 895 m² dan Sumatera Barat 2.188 m² untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST-350/SU/05/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Nilai tanah keseluruhan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp 7.315.400.000,00. Tanah tersebut sudah memiliki gambar gedung (blue print) tetapi belum di bangun karena keterbatasan kesediaan anggaran Ombudsman Republik Indonesia. Nilai tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

TABEL 21.

Nilai Tanah 31 Desember Tahun 2017

NO	PERWAKILAN	31 Desember 2017
1	DI Yogyakarta	4.689.800.000
2	Sumatera Barat	2.625.600.000
Jumlah		7.315.400.000

*Peralatan dan
Mesin*
Rp40.151.199.049

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp40.151.199.049,00 dan Rp35.608.495.801,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.838.741.033,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp13.312.458.016,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 22.

Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember Tahun 2017

URAIAN	JUMLAH
Nilai Perolehan per 31 Des 2016	35.608.495.801
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.542.703.248
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	40.151.199.049
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(26.838.741.033)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	13.312.458.016

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa penambahan dari pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp4.542.703.248,00.

*Gedung dan
Bangunan Rp0*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan aset untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di DI Yogyakarta dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gedung dan bangunan tersebut diperoleh transfer dari BPKP Perwakilan DI Yogyakarta dengan nilai Rp118.554.989,00.

Gedung dan Bangunan yang dimiliki tersebut sudah tidak layak digunakan dan harus dilakukan penghapusbukuan. Sebelum dilakukan penghapusbukuan dilakukan penilaian aset oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2016 sudah dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat sehingga nilai pada Neraca atas Gedung dan Bangunan tersebut menjadi nihil.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 23.

Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal 01 Januari 2017	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi	-
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp3.069.208.880*

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp3.069.208.880,00 dan Rp2.052.544.413,00.

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 24.
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH
Saldo per 01 Januari 2017	2.052.544.413
Mutasi tambah:	
Pembelian	996.664.467
Koreksi Nilai	20.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2017	3.069.208.880
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	100.682.392
Nilai Buku per 31 Desember 2017	2.968.526.488

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(26.939.423.425)*

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp(26.939.423.425,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 25.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	7.315.400.000	-	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	40.151.199.049	26.838.741.033	13.312.458.016
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	3.069.208.880	100.682.392	2.968.526.488
Jumlah		50.535.807.929	26.939.423.425	23.596.384.504

Aset Lainnya
Rp467.507.982

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp467.507.982,00 dan Rp447.354.423,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut:

TABEL 26.
Rincian Aset Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
1	Aset Tak Berwujud	669.729.234	467.059.234
2	Aset Lain-lain	1.256.377.439	1.256.377.439
Jumlah		1.926.106.673	1.723.436.673
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.458.598.691)	(1.276.082.250)
Nilai Buku per 31 DESEMBER 2017		467.507.982	447.354.423

Aset Tak Berwujud
Rp669.729.234

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp669.729.234 dan Rp467.059.234,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ombudsman Republik Indonesia berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 27.
Rincian Aset tak Berwujud

NO.	URAIAN	NILAI
Saldo 31 Desember 2016		467.059.234
1	Pembelian Software	202.670.000
Jumlah 31 Desember 2017		669.729.234

Terdapat penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud berupa Software sebesar Rp202.670.000,00 sampai dengan 31 Desember 2017.

Aset Lain-Lain
Rp1.256.377.439

C.3.2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.256.377.439,00 dan Rp1.256.377.439,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Ombudsman Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

TABEL 28.
Rincian Aset Lain-lain

SALDO PER 31 DESEMBER 2016	1.256.377.439
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	1.256.377.439

Tidak terdapat penambahan nilai terhadap Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2017.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(1.458.598.691)

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah Rp(1.458.598.691,00). Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian/pengamortisian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 29.
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	669.729.234	338.520.580	331.208.654
2	Aset Lain-Lain	1.256.377.439	1.120.078.111	136.299.328
Jumlah		1.926.106.673	1.458.598.691	467.507.982

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp329.574.269*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp329.574.269,00 dan Rp2.004.273.670,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 30.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	329.574.269
2	Uang Muka dari KPPN	-
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
Jumlah		329.574.269

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp329.574.269*

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Ombudsman RI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp329.574.269,00 dan Rp1.374.333.858,00. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Terdapatnya Utang Kepada Pihak Ketiga Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat belum terbayarkannya tagihan-tagihan yang sudah selesai pekerjaannya sampai dengan tanggal neraca, disajikan pada tabel berikut :

TABEL 31.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

SALDO PER 31 DESEMBER 2016	1.374.333.858
Pengurangan:	
Pembayaran Utang Tahun 2016	(1.248.283.858)
Sisa Utang Tahun 2016	126.050.000
Penambahan Tahun 2017:	
Renovasi Lantai 3 - PT. Amoraindo Utama Karya	140.395.130
Biaya Medical Check Up - Karo. Umum	2.025.000
Langganan Daya & Jasa Ombudsman RI 33 Perwakilan	48.345.899
PD. Pal Jaya Tagihan bulan Mei & September 2017	12.758.240
Saldo per 31 Desember 2017	329.574.269

Total Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp329.574.269,00 merupakan pengurangan dari pembayaran utang tahun 2016 sebesar Rp1.248.283.858,00. Adapun penambahan Utang di Tahun 2017

sebesar Rp142.420.130,00 telah di review dan di verifikasi oleh bagian Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia dan Rp61.104.139,00 merupakan hasil koreksi dari audit pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp0*

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.874.678,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal pelaporan disajikan pada Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia.

Uang Muka dari KPPN merupakan kontra akun dari Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0*

C.4.1. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp621.065.134,00. Merupakan utang yang harus diselesaikan pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas dimana Utang Jangka Pendek Lainnya ini muncul karena adanya uang pungutan pajak yang belum sempat disetor per tanggal neraca, sisa LS yang belum di setorkan ke Kas Negara per tanggal neraca dan uang lain-lain pada Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas
Rp27.852.569.979*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp27.852.569.979,00 dan Rp25.692.199.866,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Rp(137.087.105.914)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing minus Rp137.087.105.914,00 dan Rp113.776.307.078,00. Jumlah Tahun 2017 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp23.574.250,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp137.110.680.164,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp23.754.250

D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Operasional Ombudsman Republik Indonesia merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp23.574.250,00 dan Rp0,00.

Beban Operasional
Rp137.110.680.164

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp137.110.680.164,00 dan Rp113.776.307.078,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel berikut ini:

TABEL 32.

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik (Turun)
Beban Pegawai	48.161.588.930	36.308.611.325	32,64
Beban Persediaan	1.922.700.830	1.315.993.171	46,10
Beban Barang dan Jasa	36.627.603.908	33.335.005.749	9,87
Beban Pemeliharaan	5.158.534.240	4.289.176.371	20,26
Beban Perjalanan Dinas	40.026.787.582	33.375.939.340	19,92
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.213.355.679	5.151.092.882	1,20
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	108.995	488.240	(77,67)
TOTAL	137.110.680.164	113.776.307.078	20,50

Beban Pegawai
Rp48.161.588.930

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai untuk 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp48.161.588.930,00 dan Rp36.308.611.325,00.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 33.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.091.292.877	7.220.256.898	(1,78)
Beban Honorarium	14.762.365.500	11.162.945.040	32,24
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	26.307.930.553	17.925.409.387	46,76
Jumlah Beban Bersih	48.161.588.930	36.308.611.325	32,64

Beban Persediaan
Rp1.922.700.830

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.922.700.830,00 dan Rp1.315.993.171,00. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 34.

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2017 dan 2016

JENIS BEBAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	1.922.700.830	1.315.993.171	46,10
Total	1.922.700.830	1.315.993.171	46,10

Beban Barang dan Jasa
Rp36.627.603.908

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang-Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2017 dan 31 Desember Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.627.603.908,00 dan Rp33.335.005.749,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 35.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2017 dan 2016

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	7.331.208.698	5.759.909.348	27,27
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	878.399.600	633.981.570	38,55
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	570.857.000	526.420.000	8,44
Beban Bahan	6.517.838.464	6.031.735.273	8,05
Beban Honor Output Kegiatan	1.249.325.000	1.495.457.500	(16,45)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.616.418.463	3.332.141.684	8,53
Beban Langganan Listrik	2.008.206.750	1.864.399.241	7,71
Beban Langganan Telepon	309.168.463	630.886.197	(50,99)
Beban Langganan Air	183.107.157	161.688.079	13,24
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.149.566.478	536.793.691	114,15
Beban Jasa Pos dan Giro	8.763.251	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	20.000.000	(100)
Beban Sewa	8.585.577.269	8.216.752.691	4,48
Beban Jasa Profesi	965.700.000	2.027.143.500	(52,36)
Beban Jasa Lainnya	3.249.672.315	2.097.696.975	54,91
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.795.000	0	0
Jumlah Beban Barang dan Jasa	36.627.603.908	33.335.005.749	9,87

Beban Pemeliharaan
Rp5.158.534.240

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.158.534.240,00 dan Rp4.289.176.371,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 36.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.749.357.882	2.297.813.565	19,65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.409.116.358	1.977.476.876	21,82
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	60.000	13.820.930	(99,56)
Beban Persediaan suku cadang	0	65.000	(100)
Jumlah Beban Pemeliharaan	5.158.534.240	4.289.176.371	20,26

*Beban Perjalanan Dinas
Rp40.026.787.582*

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp40.026.787.582,00 dan Rp 33.375.939.340,00. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 37.Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	30 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	21.414.960.400	21.142.276.101	1,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.355.882.767	6.229.145.395	114,40
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.049.472.469	5.351.591.706	(5,64)
Beban Perjalanan Luar Negeri	206.471.946	652.926.138	(68,37)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	40.026.787.582	33.375.939.340	19,92

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp5.213.355.679

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.213.355.679,00 dan Rp5.151.092.882,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 38.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.955.809.971	5.053.233.444	(1,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1.259.647	(100)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	100.682.392	0	0
Beban Amortisasi Software	125.853.559	59.023.558	113,22
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	0	6.008.660	(100)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	31.009.757	31.567.573	(1,76)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.213.355.679	5.151.092.882	(1,20)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp108.995

D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2017 berasal dari Piutang Bukan Pajak atas kelebihan Pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Kinerja PNS Ombudsman RI Tahun Anggaran 2017. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp108.995,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 39.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2017

JENIS BEBAN	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	108.995	488.240	(200)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	108.995	488.240	(200)

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(1.203.565.605)*

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.203.565.605,00 dan Rp2.259.191.083,00. Jumlah Tahun 2017 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Non Operasional lainnya sebesar Rp1.455.249.158,00 dikurangi dengan Beban Non Operasional lainnya sebesar Rp251.683.553,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp25.692.199.866*

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp25.692.199.866,00 dan Rp13.648.349.096,00.

*Surplus/(Defisit) LO
Rp(135.883.540.309)*

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar minus Rp135.883.540.309,00 dan minus Rp111.517.115.995,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Nilai Ekuitas
Rp(5.653.125)*

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar minus Rp5.653.125,00 dan minus Rp57.146.484,00. Jumlah per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut terdiri atas :

TABEL 40.

Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(5.653.125)	(57.146.484)
TOTAL	(5.653.125)	(57.146.484)

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp(5.653.125)*

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar minus Rp5.653.125 00 dan minus Rp57.146.484,00.

TABEL 41.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2016

URAIAN	JUMLAH
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	20.000.000
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(25.653.125)
TOTAL	(5.653.125)

Koreksi berasal dari Transaksi Mutasi Barang Milik Negara pada aplikasi SIMAK-BMN berupa kesalahan pencatatan nilai Saldo Awal Peralatan Mesin yang tidak tercatat pada tahun sebelumnya serta Akumulasi Amortisasi atas *Software*.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp138.049.563.547*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp138.049.563.547,00 dan Rp123.618.113.249,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas :

TABEL 42.

Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016
Ditagihkan Ke Entitas Lain	138.716.298.862	126.143.918.276
Diterima dari Entitas Lain	(666.735.315)	(2.525.805.027)
TOTAL	138.049.563.547	123.618.113.249

*Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp138.716.298.862*

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp138.716.298.862,00 dan Rp126.143.918.276,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan realisasi belanja yang telah di terima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2017.

*Diterima dari Entitas
Lain Rp(666.735.315)*

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp666.735.315,00 dan minus Rp2.525.805.027,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu serta temuan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2017.

Ekuitas Akhir
Rp27.852.569.979

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp27.852.569.979,00 dan Rp25.692.199.866,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp28.182.144.248,00 di kurangi nilai Kewajiban sebesar Rp329.574.269,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lain-Lain sebagai berikut :

1. Sampai dengan per 31 Desember 2017 terdapat revisi RKA-KL sebanyak sembilan kali yaitu:
 - Revisi I tanggal 20 Maret 2017
 - Revisi II tanggal 05 April 2017
 - Revisi III tanggal 30 Mei 2017
 - Revisi IV tanggal 22 Agustus 2017
 - Revisi V tanggal 13 September 2017
 - Revisi VI tanggal 22 September 2017
 - Revisi VII tanggal 30 Oktober 2017
 - Revisi VIII tanggal 04 Desember 2017
 - Revisi IX tanggal 22 Desember 2017
2. Sampai dengan per 31 Desember 2017 terdapat penambahan anggaran sebesar:
 - Rp 17.748.148.000,00 untuk alokasi Belanja Pegawai
 - Rp 6.109.825.000,00 untuk alokasi Belanja Barang, dan
 - Rp 49.160.000,00 untuk alokasi Belanja Modal.
3. Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas satu satker, yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan menggunakan Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.
4. Ombudsman Republik Indonesia mengelola satu rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni Sekretariat Negara dengan nomor rekening 96543728 (BPG182 OMBUDSMAN RI).
5. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia memberhentikan dengan hormat Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia per-tanggal 9 Juni 2017.
6. Ombudsman RI pada tahun anggaran 2017 sebagai instansi penerima manfaat hibah (*Implementing Agency*) memperoleh kegiatan berupa *capacity building*, penyusunan kerja investigasi, dan fasilitasi integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diperuntukkan bagi Insan ORI yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

dan/atau Hibah bersumber dari:

- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia
- CEGAH-USAID

LAMPIRAN



AUDITED

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:48 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	16,412,365,138	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	666,735,315	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	4,720,382,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	96,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	333,850,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	81,370,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	479,050,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	325,000,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	207,824,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	399,775,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	1,233,787,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,000,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	266,368,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	16,156,119,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	79,664,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	28,288,458,000
2.0	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito	0	79,705,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	7,645,276,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,059,384,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	645,840,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	7,518,642,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,558,495,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	4,163,071,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,201,980,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,992,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	397,200,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	241,200,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,379,040,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	100,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	9,623,908,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	1,863,450,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	3,337,720,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,707,050,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,755,970,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	24,385,350,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	15,548,108,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	6,823,261,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	430,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4,420,036,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:48 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,000,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	676,235,000
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	23,574,250
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	643,161,065
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,664,103,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69,653	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	60
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	278,556,880	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	66,904,398	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	360,580,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	14,525,106	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	251,659,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,210,126,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	4,000,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	249,855,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	14,764,325,500	0
3.1	512111	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap	0	1,960,000
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	26,328,908,446	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	5,015,425
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,321,006,808	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,581,350
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	879,330,600	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	931,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	570,857,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,767,550,752	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	6,608,170
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,367,675,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	4,050,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,823,890,463	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	18,052,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,697,587,182	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1,725,500
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,991,843,267	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	1,969,256
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	310,142,459	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	973,996
3.0	522113	Belanja Langganan Air	179,677,347	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:48 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,133,455,479	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,709,100
3.0	522141	Belanja Sewa	9,313,335,457	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	976,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,249,672,315	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,609,262,752	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	300,000
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,451,105,856	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,089,498
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,160,263,631	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,745,303,231
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,893,594,926	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	518,262,159
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,537,769,676	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	488,297,207
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	218,467,834	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	11,995,888
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,350,337,428	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	996,664,467	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	540,168,520	0
JUMLAH			158,612,473,155	158,612,473,155

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:51 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	3,120,991,906	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	119,447,063	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	597,235
0.0	117111	Barang Konsumsi	878,410,028	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	7,315,400,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	40,151,199,049	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	3,020,471,755	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	48,737,125	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	26,838,741,033
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	100,682,392
0.0	162151	Software	669,729,234	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	961,680,039	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	294,697,400	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	921,304,271
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	338,520,580
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	198,773,840
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	190,766,029
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	138,808,240
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	138,716,298,862
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	666,735,315	0
0.0	391111	Ekuitas	0	25,692,199,866
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	20,000,000
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	25,653,125	0
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	23,574,250
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	643,161,065
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	812,088,093
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,664,103,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	69,653	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:51 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	60
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	278,556,880	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	66,904,398	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	360,580,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	3,250,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	14,525,106	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	251,659,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,204,289,400	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4,000,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	249,855,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	14,764,325,500	0
3.1	512111	Pengembalian Beban Uang Honor Tetap	0	1,960,000
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	26,312,945,978	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	5,015,425
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	7,335,790,048	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	4,581,350
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	879,330,600	0
3.1	521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	931,000
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	570,857,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,524,446,634	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	6,608,170
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,253,375,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	4,050,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,634,470,463	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	18,052,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,010,176,006	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	1,969,256
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	310,142,459	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	973,996
3.0	522113	Beban Langganan Air	183,107,157	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,151,275,578	0
3.1	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,709,100
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	8,763,251	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,585,577,269	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	965,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,249,672,315	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,749,657,882	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	300,000
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,411,205,856	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 6:51 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,089,498
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	23,160,263,631	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,745,303,231
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,874,144,926	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	518,262,159
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,537,769,676	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	488,297,207
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	218,467,834	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	11,995,888
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,955,809,971	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	100,682,392	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	125,853,559	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	31,009,757	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,922,700,830	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	60,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	251,683,553	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	108,995	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,795,000	0
JUMLAH			197,450,864,096	197,450,864,096

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 110
 ESELON I : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 01
 WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199
 SATUAN KERJA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 439624

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 12/04/18 6:52 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	666,735,315	(666,735,315)	0	0	2,525,805,027	(2,525,805,027)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	666,735,315	(666,735,315)	0	0	2,525,805,027	(2,525,805,027)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	52,655,448,000	48,183,387,998	4,472,060,002	92	43,684,173,000	36,406,259,320	7,277,913,680	83
	BELANJA BARANG	96,376,945,000	84,645,740,449	11,731,204,551	88	111,321,685,000	76,659,686,922	34,661,998,078	69
	BELANJA MODAL	6,096,271,000	5,887,170,415	209,100,585	97	15,050,394,000	13,077,972,034	1,972,421,966	87
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	155,128,664,000	138,716,298,862	16,412,365,138	89	170,056,252,000	126,143,918,276	43,912,333,724	80
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110
 ESELON I : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0199
 SATUAN KERJA : 439624
 JENIS SATUAN KERJA : KP

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 Kode UAPPAW Tidak Ada
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 12/04/18 6:54 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 12/4/18 6:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,386,695,000	4,720,382,000	4,664,103,000	0	4,664,103,000	98.81	56,279,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	96,000	96,000	69,653	60	69,593	72.56	26,407
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	333,850,000	333,850,000	278,556,880	0	278,556,880	83.44	55,293,120
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	81,370,000	81,370,000	66,904,398	0	66,904,398	82.22	14,465,602
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	479,050,000	479,050,000	360,580,000	3,250,000	357,330,000	75.27	121,720,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	325,000,000	325,000,000	0	0	0	0	325,000,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	207,824,000	207,824,000	14,525,106	0	14,525,106	6.99	193,298,894
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	399,775,000	399,775,000	251,659,500	0	251,659,500	62.95	148,115,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,233,787,000	1,233,787,000	1,210,126,000	0	1,210,126,000	98.08	23,661,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	266,368,000	266,368,000	249,855,000	0	249,855,000	93.8	16,513,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,713,815,000	8,051,502,000	7,100,379,537	3,250,060	7,097,129,477	88.19	954,372,523
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	8,694,156,000	16,156,119,000	14,764,325,500	1,960,000	14,762,365,500	91.39	1,393,753,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	8,694,156,000	16,156,119,000	14,764,325,500	1,960,000	14,762,365,500	91.39	1,393,753,500
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	79,664,000	79,664,000	0	0	0	0	79,664,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	79,664,000	79,664,000	0	0	0	0	79,664,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18,339,960,000	28,288,458,000	26,328,908,446	5,015,425	26,323,893,021	93.07	1,964,564,979
512412	Belanja Pegawai Transito	79,705,000	79,705,000	0	0	0	0	79,705,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	18,419,665,000	28,368,163,000	26,328,908,446	5,015,425	26,323,893,021	92.81	2,044,269,979
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	34,907,300,000	52,655,448,000	48,193,613,483	10,225,485	48,183,387,998	91.53	4,472,060,002
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7,325,400,000	7,645,276,000	7,321,006,808	4,581,350	7,316,425,458	95.76	328,850,542
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,059,560,000	1,059,384,000	879,330,600	931,000	878,399,600	83	180,984,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	645,840,000	645,840,000	570,857,000	0	570,857,000	88.39	74,983,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,030,800,000	9,350,500,000	8,771,194,408	5,512,350	8,765,682,058	93.8	584,817,942
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,607,284,000	7,518,642,000	6,767,550,752	6,608,170	6,760,942,582	90.01	757,699,418
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,547,230,000	1,558,495,000	1,367,675,000	4,050,000	1,363,625,000	87.76	194,870,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,986,900,000	4,163,071,000	3,823,890,463	18,052,000	3,805,838,463	91.85	357,232,537

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110
 ESELON I : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0199
 SATUAN KERJA : 439624
 JENIS SATUAN KERJA : KP

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 Kode UAPPAW Tidak Ada
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 12/04/18 6:54 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 12/4/18 6:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	13,141,414,000	13,240,208,000	11,959,116,215	28,710,170	11,930,406,045	90.32	1,309,801,955
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,226,100,000	2,201,980,000	1,697,587,182	1,725,500	1,695,861,682	77.09	506,118,318
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,226,100,000	2,201,980,000	1,697,587,182	1,725,500	1,695,861,682	77.09	506,118,318
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,992,000,000	1,992,000,000	1,991,843,267	1,969,256	1,989,874,011	99.99	2,125,989
522112	Belanja Langganan Telepon	894,000,000	397,200,000	310,142,459	973,996	309,168,463	78.08	88,031,537
522113	Belanja Langganan Air	312,000,000	241,200,000	179,677,347	0	179,677,347	74.49	61,522,653
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,389,600,000	1,379,040,000	1,133,455,479	1,709,100	1,131,746,379	82.19	247,293,621
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,536,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
522141	Belanja Sewa	12,039,700,000	9,623,908,000	9,313,335,457	0	9,313,335,457	96.77	310,572,543
522151	Belanja Jasa Profesi	2,784,800,000	1,863,450,000	976,100,000	0	976,100,000	52.38	887,350,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	3,800,632,000	3,337,720,000	3,249,672,315	0	3,249,672,315	97.36	88,047,685
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,748,732,000	18,934,518,000	17,154,226,324	4,652,352	17,149,573,972	90.6	1,784,944,028
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,627,700,000	2,707,050,000	2,609,262,752	300,000	2,608,962,752	96.39	98,087,248
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,559,900,000	2,755,970,000	2,451,105,856	2,089,498	2,449,016,358	88.94	306,953,642
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,187,600,000	5,463,020,000	5,060,368,608	2,389,498	5,057,979,110	92.63	405,040,890
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,549,514,000	24,385,350,000	23,160,263,631	1,745,303,231	21,414,960,400	94.98	2,970,389,600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,519,788,000	15,548,108,000	13,893,594,926	518,262,159	13,375,332,767	89.36	2,172,775,233
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,909,550,000	6,823,261,000	5,537,769,676	488,297,207	5,049,472,469	81.16	1,773,788,531
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	38,978,852,000	46,756,719,000	42,591,628,233	2,751,862,597	39,839,765,636	91.09	6,916,953,364
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,050,000,000	430,000,000	218,467,834	11,995,888	206,471,946	50.81	223,528,054
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,050,000,000	430,000,000	218,467,834	11,995,888	206,471,946	50.81	223,528,054
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	94,363,498,000	96,376,945,000	87,452,588,804	2,806,848,355	84,645,740,449	90.74	11,731,204,551
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4,420,036,000	4,350,337,428	0	4,350,337,428	98.42	69,698,572
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	4,420,036,000	4,350,337,428	0	4,350,337,428	98.42	69,698,572
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	1,000,000,000	996,664,467	0	996,664,467	99.67	3,335,533
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,000,000,000	1,000,000,000	996,664,467	0	996,664,467	99.67	3,335,533

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0199
SATUAN KERJA : 439624
JENIS SATUAN KERJA : KP

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Kode UAPPAW Tidak Ada
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 12/04/18 6:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 12/4/18 6:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	950,733,000	676,235,000	540,168,520	0	540,168,520	79.88	136,066,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	950,733,000	676,235,000	540,168,520	0	540,168,520	79.88	136,066,480
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,950,733,000	6,096,271,000	5,887,170,415	0	5,887,170,415	96.57	209,100,585
	JUMLAH BELANJA	131,221,531,000	155,128,664,000	141,533,372,702	2,817,073,840	138,716,298,862	91.24	16,412,365,138

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KDUAPPAW : 110010100KP null
KODE SATKER : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 12/04/2018 7:50 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8,874,678	(8,874,678)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	621,065,134	(621,065,134)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,120,991,906	2,883,605,758	237,386,148	8.23
Piutang Bukan Pajak	119,447,063	97,647,995	21,799,068	22.32
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(597,235)	(488,240)	(108,995)	22.32
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	118,849,828	97,159,755	21,690,073	22.32
Persediaan	878,410,028	544,904,636	333,505,392	61.20
JUMLAH ASET LANCAR	4,118,251,762	4,155,609,961	(37,358,199)	(0.90)
ASET TETAP				
Tanah	7,315,400,000	7,315,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	40,151,199,049	35,608,495,801	4,542,703,248	12.76
Aset Tetap Lainnya	3,069,208,880	2,052,544,413	1,016,664,467	49.53
AKUMULASI PENYUSUTAN	(26,939,423,425)	(21,882,931,062)	(5,056,492,363)	23.11
JUMLAH ASET TETAP	23,596,384,504	23,093,509,152	502,875,352	2.18
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	669,729,234	467,059,234	202,670,000	43.39
Aset Lain-lain	1,256,377,439	1,256,377,439	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,458,598,691)	(1,276,082,250)	(182,516,441)	14.30
JUMLAH ASET LAINNYA	467,507,982	447,354,423	20,153,559	4.51
JUMLAH ASET	28,182,144,248	27,696,473,536	485,670,712	1.75
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	329,574,269	1,374,333,858	(1,044,759,589)	(76.02)
Uang Muka dari KPPN	0	8,874,678	(8,874,678)	(100.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	621,065,134	(621,065,134)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	329,574,269	2,004,273,670	(1,674,699,401)	(83.56)
JUMLAH KEWAJIBAN	329,574,269	2,004,273,670	(1,674,699,401)	(83.56)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	27,852,569,979	25,692,199,866	2,160,370,113	8.41
JUMLAH EKUITAS	27,852,569,979	25,692,199,866	2,160,370,113	8.41
JUMLAH EKUITAS	27,852,569,979	25,692,199,866	2,160,370,113	8.41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	28,182,144,248	27,696,473,536	485,670,712	1.75

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 12/04/18 7:51 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 12/04/18 6:00 PM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,574,250	0	23,574,250	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	23,574,250	0	23,574,250	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	23,574,250	0	23,574,250	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	48,161,588,930	36,308,611,325	11,852,977,605	32.645
Beban Persediaan	1,922,700,830	1,315,993,171	606,707,659	46.103
Beban Barang dan Jasa	36,627,603,908	33,335,005,749	3,292,598,159	9.877
Beban Pemeliharaan	5,158,534,240	4,289,176,371	869,357,869	20.269
Beban Perjalanan Dinas	40,026,787,582	33,375,939,340	6,650,848,242	19.927
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 12/04/18 7:51 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 12/04/18 6:00 PM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,213,355,679	5,151,092,882	62,262,797	1.209
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	108,995	488,240	(379,245)	(77.676)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	137,110,680,164	113,776,307,078	23,334,373,086	20.509
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(137,087,105,914)	(113,776,307,078)	(23,310,798,836)	20.488
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(11,390,068)	11,390,068	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	11,390,068	(11,390,068)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,203,565,605	2,270,581,151	(1,067,015,546)	(46.993)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,455,249,158	2,606,405,014	(1,151,155,856)	(44.166)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	251,683,553	335,823,863	(84,140,310)	(25.055)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,203,565,605	2,259,191,083	(1,055,625,478)	(46.726)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(135,883,540,309)	(111,517,115,995)	(24,366,424,314)	21.85
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(135,883,540,309)	(111,517,115,995)	(24,366,424,314)	21.85

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KP
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 12/04/18 6:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	25,692,199,866	13,648,349,096	12,043,850,770	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135,883,540,309)	(111,517,115,995)	(24,366,424,314)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(5,653,125)	(57,146,484)	51,493,359	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,653,125)	(57,146,484)	51,493,359	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	138,049,563,547	123,618,113,249	14,431,450,298	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,160,370,113	12,043,850,770	(9,883,480,657)	-
EKUITAS AKHIR	27,852,569,979	25,692,199,866	2,160,370,113	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
ESELON I : 01 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439624 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 12/04/18 6:54 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4237	Pendapatan Iuran dan Denda					
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	23,574,250	0	23,574,250	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4237	0	23,574,250	0	23,574,250	0
4239	Pendapatan Lain-lain					
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	643,161,065	0	643,161,065	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4239	0	643,161,065	0	643,161,065	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	666,735,315	0	666,735,315	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	666,735,315	0	666,735,315	0

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 12-04-2018
Halaman : 1
Kode Lap. : LBNIT

NAMA UAPB : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	878,410,028
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
131111	Tanah	7,315,400,000
132111	Peralatan dan Mesin	40,151,199,049
133111	Gedung dan Bangunan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	3,020,471,755
135121	Aset Tetap Lainnya	48,737,125
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26,838,741,033)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(100,682,392)
162151	Software	669,729,234
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	961,680,039
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	294,697,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(921,304,271)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(338,520,580)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(198,773,840)
J U M L A H		24,942,302,514

JAKARTA, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAPB
Kepala Biro Umum



[Signature]
Johar W. Marpaung
19621227 198203 1 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAPB : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 12-04-2018
Halaman : 1
Kode Lap. : LBNIT

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	878,410,028	0	878,410,028
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
131111	Tanah	7,315,400,000	0	7,315,400,000
132111	Peralatan dan Mesin	40,151,199,049	26,838,741,033	13,312,458,016
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	3,020,471,755	100,682,392	2,919,789,363
135121	Aset Tetap Lainnya	48,737,125	0	48,737,125
162151	Software	669,729,234	338,520,580	331,208,654
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	961,680,039	921,304,271	40,375,768
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	294,697,400	198,773,840	95,923,560
J U M L A H		53,340,324,630	28,398,022,116	24,942,302,514

JAKARTA, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAPB
Kepala Biro Umum



[Signature]
Johar W. Marpaung
19621227 198203 1 001



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-5243/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Mei 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	131,221,531,000	131,221,531,000	0
2	Belanja	41,759,927,529	41,759,927,529	0
3	Pengembalian Belanja	-425,609,212	-425,609,212	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	652,903,426	652,903,426	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 131,221,531,000

SAI/SA-BUN : 131,221,531,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 41,759,927,529

SAI/SA-BUN : 41,759,927,529

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -425,609,212

SAI/SA-BUN : -425,609,212

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 652,903,426

SAI/SA-BUN : 652,903,426

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-27227/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juni 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	131,221,531,000	131,221,531,000	0
2	Belanja	52,494,292,365	52,494,292,365	0
3	Pengembalian Belanja	-607,153,882	-607,153,882	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 131,221,531,000

SAI/SA-BUN : 131,221,531,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 52,494,292,365

SAI/SA-BUN : 52,494,292,365

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -607,153,882

SAI/SA-BUN : -607,153,882

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-59175/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juli 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	131,221,531,000	131,221,531,000	0
2	Belanja	63,968,481,844	63,968,481,844	0
3	Pengembalian Belanja	-873,128,343	-873,128,343	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juli tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 131,221,531,000

SAI/SA-BUN : 131,221,531,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 63,968,481,844

SAI/SA-BUN : 63,968,481,844

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -873,128,343

SAI/SA-BUN : -873,128,343

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-69907/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Agustus 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	131,221,531,000	131,221,531,000	0
2	Belanja	75,890,395,183	75,890,395,183	0
3	Pengembalian Belanja	-944,211,089	-944,211,089	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 131,221,531,000

SAI/SA-BUN : 131,221,531,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 75,890,395,183

SAI/SA-BUN : 75,890,395,183

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -944,211,089

SAI/SA-BUN : -944,211,089

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



A. ANIMAHARSI, AK., M.ACC.
NIP.195907291980122001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-102823/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	147,310,775,000	147,310,775,000	0
2	Belanja	88,459,476,693	88,459,476,693	0
3	Pengembalian Belanja	-1,238,068,586	-1,238,068,586	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan September tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 147,310,775,000

SAI/SA-BUN : 147,310,775,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 88,459,476,693

SAI/SA-BUN : 88,459,476,693

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,238,068,586

SAI/SA-BUN : -1,238,068,586

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-124415/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Oktober 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	147,310,775,000	147,310,775,000	0
2	Belanja	100,917,776,071	100,917,776,071	0
3	Pengembalian Belanja	-1,355,566,198	-1,355,566,198	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Oktober tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 147,310,775,000

SAI/SA-BUN : 147,310,775,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 100,917,776,071

SAI/SA-BUN : 100,917,776,071

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,355,566,198

SAI/SA-BUN : -1,355,566,198

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-150062/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Nopember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	148,969,679,000	148,969,679,000	0
2	Belanja	114,569,468,812	114,569,468,812	0
3	Pengembalian Belanja	-1,602,962,274	-1,602,962,274	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	655,745,244	655,745,244	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,491,125,322	2,491,125,322	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,500,000,000	2,500,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 148,969,679,000

SAI/SA-BUN : 148,969,679,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 114,569,468,812

SAI/SA-BUN : 114,569,468,812

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,602,962,274

SAI/SA-BUN : -1,602,962,274

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 655,745,244

SAI/SA-BUN : 655,745,244

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,491,125,322

SAI/SA-BUN : 2,491,125,322

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,500,000,000

SAI/SA-BUN : 2,500,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-163858/WPB.11/KP.182/2017

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	155,128,664,000	155,128,664,000	0
2	Belanja	141,533,372,702	141,533,372,702	0
3	Pengembalian Belanja	-2,817,073,840	-2,817,073,840	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	666,735,315	666,735,315	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-8,874,678	-8,874,678	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 155,128,664,000

SAI/SA-BUN : 155,128,664,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 141,533,372,702

SAI/SA-BUN : 141,533,372,702

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -2,817,073,840

SAI/SA-BUN : -2,817,073,840

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 666,735,315

SAI/SA-BUN : 666,735,315

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : -8,874,678

SAI/SA-BUN : -8,874,678

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

Setiyono
NIP.197311161996021001



DR. HARTOYO, SH, M.HUM, M.SI
NIP.196209021982031002

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



**JL. HR RASUNA SAID KAV. C-19 KUNINGAN
JAKARTA SELATAN 12920
TELP. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 FAX : (021) 5296 0907-08**